

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GOLPUT PADA PEMILUKADA KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2010

Roro Merry Chornelia Wulandary

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

E-mail: merrychornelia@yahoo.co.id

***Abstract:** The public perception showed that there are some reasons why people choose to be 'white voters'. They were no longer trust to the local government and care to determine the next leader. They did not support the regional head election and concern about the state life and local development anymore. They threw away the given opportunity and had the negative perception of pragmatic and apathetic white voters. Governmental distrust is the main reason why the voters were unwilling to participate in politics.*

***Key words:** public perception; political participation; white voters*

Abstrak: Persepsi masyarakat menunjukkan adanya berbagai alasan warga untuk menjadi golongan putih, yaitu: tidak percaya lagi terhadap pemerintahan, tidak mendukung pemilihan kepala daerah, sikap acuh terhadap penentuan pemimpin berikutnya, tidak peduli dengan kehidupan negara dan pembangunan di daerah, membuang kesempatan yang telah diberikan, serta ada pula persepsi negatif dari golongan putih apatis dan pragmatis. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah menjadi alasan utama pemilih enggan ikut berpartisipasi dalam politik.

Kata Kunci: persepsi masyarakat; partisipasi politik; golongan putih

PENDAHULUAN

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung sebagaimana telah tertuang dalam Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan wadah pemilihan umum. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah diuji coba selama sebelas kali Pemilu untuk Lembaga Legislatif yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Setelah keberhasilan pelaksanaan Pemilu pada tahun-tahun tersebut, Pemerintah berkeyakinan bahwa Pemilihan Kepala Daerah juga akan dapat dilaksanakan secara aman dan damai. Sebelumnya, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan tidak secara langsung melainkan hanya melalui Dewan. Pertama kali dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, baik itu untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota ialah pada tahun 2005.

Dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, timbul dampak baik dan buruk yaitu: adanya partisipasi rakyat untuk melibatkan dirinya pada kepentingan negara, munculnya pemahaman dan kesadaran bahwa rakyat juga menjadi penentu masa depan negara. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh minat terhadap persoalan negara. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ini dibuktikan dalam sikap “golongan putih” (Golput) pada kegiatan Pemilu.

Golput menjadi sebuah tren klasik dan polemik yang seringkali terjadi dalam Pemilu. Bukan hanya dalam Pileg dan Pilpres tetapi juga berlaku pada Pilbub di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo. Pada tanggal 4 Juli 2010 dilaksanakan Pilbub di Kabupaten Ponorogo, yang mencakup 21 kecamatan dengan jumlah total pemilih 772612. Dalam pelaksanaan Pilbub Kabupaten Ponorogo didapati sebanyak 29% dari jumlah total masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Mendapati adanya “golongan putih” tersebut, diasumsikan bahwa kalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo memiliki persepsi dan sudut pandang yang berbeda-beda mengenai Pilbub.

Golput memang menjadi sebuah hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat di setiap Pemilu. Masyarakat bahkan memiliki pandangan yang beragam pada Golput, sebab masyarakat dapat menilai dan menangkap stimuli indrawi atas berbagai macam hal yang terjadi dalam Golput ini. Pandangan masyarakat inilah yang dinamakan dengan persepsi. Dari sini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris tentang persepsi masyarakat terhadap Golput di Kabupaten Ponorogo.

Kajian Pustaka

Hakikat Persepsi Masyarakat

Sebagai makhluk yang memiliki bentuk pemikiran yang beragam, setiap manusia pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu masalah. Menurut Moskowitz dan Orgel yang dikutip oleh Walgito (2002:15) dalam bukunya “Psikologi Kelompok”, persepsi merupakan proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Sementara itu, Rohim (2011:59) menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan pemberian makna pada stimulus indrawi.

Proses terjadinya persepsi sebagaimana yang telah disebutkan pada definisi-definisi di atas melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.

2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
3. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. (Walgito, 2002:15)

Terdapat empat karakteristik dari faktor pribadi dan sosial yang dapat mempengaruhi persepsi Kita, seperti yang dikemukakan oleh Oskamp (dalam Sadli, 1977:72-74), yaitu:

1. Faktor ciri-ciri khas objek stimulus yang akan dipersepsikan yang terdiri atas: (a) Nilai, yaitu penilaian terhadap stimuli; (b) Emosional, yaitu sampai berapa jauh stimuli tertentu merupakan sesuatu yang mengancam atau yang menyenangkan sehingga mempengaruhi persepsi seseorang; (c) Familiaritas, yaitu pengenalan berdasarkan *exposure* yang berkali-kali dari stimulus akan mengakibatkan stimuli tersebut dipersepsikan lebih akurat; dan (d) Intensitas, yaitu berhubungan dengan derajat kesadaran seseorang mengenai stimuli (tanggapan).
2. Faktor Pribadi, termasuk di dalamnya ciri-ciri khas individu, seperti: taraf kecerdasan, kepentingan, minat dan pengalaman.
3. Faktor pengaruh kelompok, artinya respon orang yang berpengaruh dalam suatu kelompok dapat memberi pengaruh ke satu tingkah laku bersama.
4. Faktor perbedaan latar belakang kultur. Menurut Harold J. Laski (dalam Budiardjo, 2000:34) bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.

Dengan demikian, pada hakikatnya persepsi masyarakat adalah suatu proses yang diawali dengan penerimaan informasi dengan alat indera terhadap stimulus. Stimulus-stimulus selanjutnya diterima oleh sekumpulan orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, sehingga menghasilkan sesuatu yang berarti dalam diri individu terhadap informasi yang diterima di lingkungannya.

Golongan Putih

Golput merupakan sebuah istilah bagi seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum di Indonesia. Dalam istilah ilmiahnya, Golput lebih dikenal dengan sebutan *voting behavior* atau perilaku pemilih. Menurut Arbi Sanit (dalam Arianto, 2011:53), Golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu.

Menurut Aspar sebagaimana dikutip oleh Saksono (2013:45) dalam bukunya “Golput dan Masa Depan Bangsa”, fenomena Golput merujuk pada:

- a. Orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes.
- b. Orang yang menghadiri tempat pemilihan suara tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar.
- c. Orang yang menggunakan hak pilihnya, namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara.

Secara teoretis, pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengetahui alasan seseorang tidak memilih adalah melalui teori-teori pendekatan perilaku pemilih (*voting behavior*). Surbakti mengelompokkan alasan pemilih memilih calon tertentu melalui beberapa pendekatan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan Struktural, melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.
- b. Pendekatan Sosiologis, cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Konkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
- c. Pendekatan Ekologis, hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial.
- d. Pendekatan Psikologi Sosial, konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau ketertarikan emosional pemilih terhadap partai tertentu.
- e. Pendekatan Pilihan Rasional, melihat kegiatan memilih sebagai kegiatan produk kalkulasi untung rugi. (2010:186)

Pemilukada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
- b. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten.
- c. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Sebelum dilaksanakan secara langsung, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pemilukada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu), sebab Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilukada mulai dimasukkan ke dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah”. Pemilukada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2007.

Pemilukada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Nangroe Aceh Darussalam, Pemilukada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwasli Aceh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang menyangkut peserta Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Khusus di Nangroe Aceh Darussalam, peserta Pemilukada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Peneliti dapat memiliki keleluasaan dan kesempatan untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat mengenai persepsinya terhadap Golput. Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data melalui observasi. Selanjutnya, Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat RT/RW: 01/10 Desa Baosan Kidul, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Observasi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data pemilih yang terdaftar, serta jumlah suara yang masuk ke KPU Ponorogo. Sementara wawancara dilakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi terhadap sejumlah informan kunci. Selanjutnya, keseluruhan data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan Teknik Triangulasi, yaitu melakukan konfirmasi hasil temuan di antara peneliti dengan informan kunci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data Berita Acara Pemungutan Suara Tahun 2010, jumlah surat suara terpakai yang berisi suara sah dari seluruh TPS di dalam Wilayah KPU Kabupaten Ponorogo ialah 541209 dan jumlah surat suara terpakai yang berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Ponorogo ialah 10648, sedangkan jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS di dalam Wilayah KPU Kabupaten Ponorogo ialah 220755.

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menemukan faktor-faktor penyebab warga Golput di RT/RW: 01/10 Desa Baosan Kidul adalah:

1. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

Adanya tebar janji kepada warga yang sering dikatakan oleh para calon yang terpilih, tetapi tidak pernah terealisasi. Hal ini pun terlihat dari banyaknya jalan yang rusak di Kabupaten Ponorogo. Padahal jika dilihat kembali dari visi dan misi Calon Bupati yang terpilih menyebutkan bahwa Ia akan meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Namun kenyataannya, hingga saat ini belum ada perbaikan.

2. Ketidaktertarikan pada Politik

Perilaku dari para Pejabat Negara yang lebih sering memperlihatkan catatan buruk terhadap kinerjanya menjadi alasan masyarakat Desa Baosan Kidul tidak tertarik pada perkembangan politik yang ada.

3. Perbedaan Ideologi

Para bakal calon maupun calon yang telah terpilih dirasa tidak mampu, tidak berkomitmen dan jauh dari nilai-nilai ideologi yang dibawanya pada saat kampanye, dimana para informan sendiri menganut ideologi yang dilandaskan agama.

4. Keadaan

Faktor keadaan ini didasarkan pada pengklasifikasian yang termasuk Golput teknis, yakni mereka yang karena alasan tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara. Kebanyakan masyarakat Desa Baosan Kidul lebih memilih melakukan aktivitas lain pada saat PemiluKada berlangsung, seperti pergi ke luar kota.

Persepsi masyarakat terhadap Golput pada PemiluKada Kabupaten Ponorogo ditunjukkan oleh para informan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan usianya, sebagai berikut:

1. Persepsi Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Informan dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/Sederajat berpandangan bahwa Golput hanya dilihat dari tingkat partisipasinya. Sedangkan untuk informan dengan jenjang pendidikan D3 hingga S3, cenderung menilai Golput dari beberapa kategori, salah satunya www.jurnal.unitri.ac.id

dengan mengkategorikan Golput yang buruk itu sebagai Golput Apatitis dan Golput Pragmatis.

2. Persepsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Di antara informan perempuan dan laki-laki mempersepsikan Golput secara berbeda. Informan perempuan lebih mempersepsikan Golput sebagai sesuatu yang kurang baik, sedangkan laki-laki lebih memaklumi Golput yang terjadi pada Pemilihan Bupati karena mereka lebih melihat Golput sebagai hak.

3. Persepsi Informan Berdasarkan Usia

Informan dengan usia 21–23 tahun lebih berpandangan bahwa Golput merupakan sesuatu yang kurang baik karena dianggap tidak menggunakan hak suara yang sudah diberikan kepadanya. Untuk informan dengan usia 43–49 tahun lebih memandang Golput sebagai sesuatu yang kurang baik karena hal itu menunjukkan ketidakpeduliannya dengan pemerintah dan kehidupan bernegara. Informan berusia 51–58 tahun memandang bahwa Golput itu wajar, dengan alasan calon yang ada dirasa tidak dapat melakukan perubahan.

Pembahasan

Dalam sebuah pembangunan di Negara Demokrasi, berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung kepada partisipasi rakyat. Dalam sudut pandang Sosiologi Politik, keluaran (*output*) dari Pemilukada Langsung diharapkan dapat menyentuh aspek pemilih yang salah satunya adalah kesetaraan politik, yakni keterlibatan masyarakat sampai pada tingkat daerah. Keterlibatan warga RT/RW: 01/10 Desa Baosan Kidul dapat dilihat dari kesediaannya menjadi panitia dalam Pemilihan Bupati tahun 2010. Peran aktif warga akan adanya tebar janji yang sering disampaikan oleh para calon yang terpilih, akan tetapi tidak direalisasikan hanya terlihat dari Pengurus RT saja.

Persepsi masyarakat Desa Baosan Kidul terhadap Golput diawali dari penilaian mereka terhadap orang-orang yang golput. Beberapa warga memandang bahwa orang-orang yang golput itu tidak memiliki rasa nasionalisme, tidak mendukung diselenggarakannya Pemilukada, munafik, egois, tidak mau ikut berpartisipasi dan tidak memiliki pendirian. Munculnya pandangan-pandangan tentang Golput tersebut didasarkan pada adanya Golput yang muncul dalam setiap Pemilu. Banyak masyarakat yang menyayangkan hal ini terjadi, padahal beberapa diantara mereka yang golput datang ke tempat pemungutan suara. Hal seperti ini yang membuat banyak dana Pemilu Langsung terbuang. Ada pula orang-orang yang berpandangan bahwa Golput dilakukan oleh orang-orang yang sama. Selain itu, Golput juga dirasakan dari banyaknya jumlah warga yang tidak hadir ke tempat pemungutan suara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan mengenai kesetaraan politik yang dilihat dari aspek pemilih belum sepenuhnya terlihat dalam keterlibatan warga RT/RW: 01/10 Baosan Kidul, Kabupaten Ponorogo. Salah satunya ialah karena faktor warga yang terkadang sulit untuk dilibatkan. Dari pandangan terhadap Golput dan orang-orang yang golput, warga mempersepsikan “golongan putih” sebagai sesuatu yang kurang baik. Latar belakang tingkat pendidikan, jenis kelamin dan usia mempengaruhi persepsi Mereka itu.

SARAN

- a. Seharusnya KPUD mengeluarkan peraturan mengenai batasan biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon Bupati, sehingga tidak ada lagi kampanye-kampanye yang mendominasi.
- b. Dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Bogor agar dapat melibatkan para pemilih muda, serta membuat visi dan misi yang mendukung kepentingan para pemilih muda.
- c. Masyarakat seharusnya dapat berperan lebih aktif, salah satunya dengan menghadiri tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Bismar. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No. 1. FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Cetakan ke-21)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, PT.
- Rohim, Syaiful. 2011. *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta, PT.
- Sadli, Saparinah. 1977. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Saksono, Ign. Gatut. 2013. *Golput dan Masa Depan Bangsa*. Yogyakarta: Amtama.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, PT.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI.